Editor :
Rianto | Muhammad Ikmal Setiadi | Gabriel Choirul Alman

INDUSTRI RADAR INDONESIA MENDUNIA

Juliana | Lukman Yudho Prakoso

INDUSTRI RADAR INDONESIA MENDUNIA

Juliana | Lukman Yudho Prakoso

Penerbit Widina

INDUSTRI RADAR INDONESIA MENDUNIA

Penulis:
Juliana
Lukman Yudho Prakoso

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Rianto
Muhammad Ikmal Setiadi
Gabriel Choirul Alman

ISBN:
978-623-459-852-0
978-623-459-853-7 (PDF)

Cetakan Pertama:
Desember, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Suatu apresiasi kepada mahasiswa Juliana, yang telah menyelesaikan karya akademik buku berjudul "*Industri Radar Indonesia Mendunia*" yang disusun dengan baik. Buku ini layak menjadi acuan dan referensi untuk dibaca karena mengkaji Strategi perencanaan dalam upaya memproduksi radar yang esensinya juga mengarah pada kemandirian industri pertahanan. Saya melihat adanya konsep yang dibangun melalui kajian implementasi kebijakan melalui teori Edward III yang biasa digunakan dalam menganalisis impelementasi suatu kebijakan. Melalui karya ini, semoga bermanfaat dan menjadi referensi pada bidang akademisi dan praktisi kedepannya.

Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat dan mengapresiasi karya yang dihasilkan oleh Juliana yang mampu menjadikan inspirasi hasil penulisan menjadi sebuah karya buku yang baik. Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala, melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aaamiin Yaa Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Desember 2023
Kaprodi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI

Dr. Ir. Lukman Yudho Prakoso., S.I.P., M.A.P.,
CIQaR., M.Tr.Opsla., IPU., ASEAN Eng
Kolonel Laut (E) Nrp: 11427/P

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul Industri Radar Indonesia Mendunia. Penulisan buku ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Akhir kata, Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Penulis melalui buku ini dapat terwujud. Penulis juga berharap buku ini dapat meningkatkan semangat dalam mewujudkan Pertahanan Indonesia yang lebih tangguh dalam mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Yang Mandiri Dalam Produksi Alutsista Nasional. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2023

Penulis

PRAKATA

Sungguh sebuah kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam bagi editor karena dapat berkontribusi menyelesaikan buku yang berjudul Industri Radar Indonesia Mendunia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah strategis perlu mempersiapkan segala strategi, sumber daya nasional dan upaya-upaya dalam menghadapi ancaman di wilayah maritim tersebut yang menjadi respons atas Perkembangan Lingkungan Strategis di kawasan Indo-Pasifik, Samudera Hindia dan sekitarnya yang menjadi isyarat akan rawannya ancaman di kawasan maritim dan perlu mempersiapkan pertahanan maritim yang kuat untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sepanjang tahun 2017 - 2019 masih terdapat banyak kasus pelanggaran wilayah udara nasional yang berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terekam sebanyak 19 kasus pelanggaran wilayah udara yang terjadi pada tahun 2017 berupa penerbangan tanpa izin antara lain 16 kasus penerbangan yang melibatkan pesawat negara, 2 kasus yang melibatkan pesawat sipil, dan satu kasus yang tidak teridentifikasi. Sementara itu, selama tahun 2018, tercatat sebanyak 65 kasus melibatkan pesawat sipil, 48 kasus melibatkan pesawat negara, dan 14 kasus tidak teridentifikasi sehingga dapat dijumlahkan sebanyak 127 kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah udara Indonesia. Lalu, sepanjang bulan Januari hingga Juni tahun 2019, sebanyak 165 kasus pelanggaran wilayah udara yang terjadi di daerah perbatasan NKRI seperti Kepulauan Riau dan wilayah perbatasan lainnya karena adanya permasalahan terkait dengan *Flight Information Region* (FIR) Singapura.

Editor Berharap, buku ini tidak hanya sekedar tulisan semata, melainkan dapat dijadikan referensi sebagai pedoman pengambilan keputusan kebijakan dalam upaya memperkuat pertahanan Nirmiliter.

Jakarta, Desember 2023
Editor

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
PRAKATA ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB 1 Pendahuluan 1
BAB 2 Ilmu Pertahanan 13
BAB 3 Pertahanan Negara 15
BAB 4 Implementasi Kebijakan Industri Radar 17
BAB 5 Ekonomi Pertahanan Terkait Industri Radar 29
BAB 6 Leading Sektor Industri Radar 31
BAB 7 Perencanaan Produksi Radar 39
BAB 8 Faktor Pendukung dan Penghambat 57
BAB 9 Penutup 83
DAFTAR PUSTAKA **85**

BAB 1

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta mensejahterahkan rakyat, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Ikut menjaga ketertiban dunia. Dalam melindungi rakyat Indonesia sangat dibutuhkan pembangunan pertahanan negara yang dilaksanakan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nir-militer, sesuai dengan yang dituangkan pada undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara yang dibangun untuk menghadapi ancaman militer adalah pertahanan militer. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, disebutkan bahwa arah dan sasaran pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia adalah diarahkan untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan yang dapat mengatasi ancaman dan gangguan yang bersifat nyata dan mendesak (Buku Putih Pertahanan). Pada skala global pertahanan negara saat ini diuji dengan adanya ancaman terhadap kedaulatan negara yang berkembang searah terhadap kemajuan teknologi. Pada kondisi saat Ini teknologi pertahanan didukung oleh kemampuan dalam penangkalan sehingga dapat memberikan jawaban mengenai tuntutan dan tanggapan terhadap ancaman yang sering berubah dan berimplikasi terhadap pertahanan negara.

BAB

2

ILMU PERTAHANAN

Ilmu pertahanan merupakan ilmu pengetahuan yang sangat luas, ilmu pertahanan tidak hanya membahas tentang “strategi” atau “ilmu militer” juga tidak hanya mempelajari penggunaan sarana angkatan bersenjata untuk memperjuangkan atau mempertahankan kepentingan politik suatu negara, tetapi lebih dari pada itu. Pertahanan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada masa damai, perang, dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri, baik ancaman militer maupun nonmiliter terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional (Supriyatno, 2014).

Makna dari uraian definisi teori pertahanan di atas, ilmu pertahanan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya nasional pada masa damai, mempersiapkan sumber daya manusia sejak dini (komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung), bagaimana mempersiapkan dan mengerahkan warga negara mempersiapkan ruang atau spasial atau geografi untuk perang terutama di dalam negeri, serta jika perang berlangsung di luar negeri, maka bagaimana mengelola warganya agar tetap memiliki jiwa patriotisme.

Dalam bukunya “Tentang Ilmu Pertahanan” Makmur Supriyatno menjelaskan secara jelas bahwa Pertahanan ada karena adanya ancaman, maka ilmu pertahanan harus mampu mencegah ancaman yang terus berkembang, karena ancaman terhadap suatu negara saat ini tidak hanya

BAB

3

PERTAHANAN NEGARA

Pada hakikatnya sistem pertahanan Negara Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta. Sistem pertahanan tersebut lebih dikenal dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang lebih dikenal dengan Sishankamrata. Sifat kesemestaannya dimana dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh (Dephan: 2008).

Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dibawah Kementerian Pertahanan dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara yang bersifat semesta mempunyai ciri-ciri yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan (kemhan: 2015).

BAB

4

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRI RADAR

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui turunan kebijakan publik tersebut.

Peter & DeLeon (2002) berpendapat bahwa pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi di antara kebijakan dan eksekusinya. Ilmuwan yang mempergunakan pendekatan ini antara lain Graham T. Allison dengan studi kasus misil Kuba (1971,1999). Pada generasi ini implementasi kebijakan berimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik.

Generasi kedua, tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” (*top-downer perspective*). Perspektif ini lebih berfokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Para ilmuwan social yang mengembangkan pendekatan ini adalah (Sabatier & Mazmanian, 1983), Robert Nakamura dan Frank Smallwood (1980), dan (Berman, 1980).

BAB

5

EKONOMI PERTAHANAN TERKAIT INDUSTRI RADAR

Ekonomi pertahanan berasal dari dua kata penting yang memiliki maknanya masing-masing yaitu ekonomi dan pertahanan. Ada perbedaan konseptual yang menonjol antara ekonomi dan pertahanan. Perbedaan utama terletak pada sifat kedua konsep tersebut yaitu, ekonomi mengutamakan kedaulatan terletak pada kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan karakter pertahanan adalah kedaulatan ada di tangan negara. Hal ini memiliki konsekuensi jika disepakati menghilangkan kegiatan ekonomi berarti meniadakan sifat manusia, dan jika menghilangkan aktivitas pertahanan berarti meniadakan kehadiran negara. Oleh karena itu perlu untuk menghubungkan dua karakter yang berbeda tersebut agar saling berkaitan erat dan saling melengkapi (Keliat, 2010).

Ilmu ekonomi pertahanan memiliki peran strategis sebagai disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan potensi dan pemanfaatan sumber daya nasional untuk pembangunan ekonomi dan pertahanan negara untuk kemakmuran sosial ekonomi dan keamanan nasional. Menurut Sandler dan Hartley (1995, dikutip dalam Yusgiantoro)., 2014, hlm. 4) Menjelaskan bahwa ilmu ekonomi pertahanan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pertahanan. Ilmu ekonomi pertahanan adalah cabang ilmu yang menerapkan ilmu ekonomi pada masalah pertahanan.

BAB

6

LEADING SEKTOR INDUSTRI RADAR

PT LEN industri (Persero) merupakan BUMNIS (Badan Usaha Milik Negara Strategis) yang bergerak di sektor elektronika untuk industri. Tadinya perusahaan ini adalah salah satu divisi di LIPI yang kemudian dikonversi pada tahun 1991 menjadi institusi yang berdiri sendiri. Lokasi perusahaan ini hanya ada satu dan bertempat di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 442.

Sebagai industri pertahanan strategis, PT LEN industri (Persero) memiliki variasi produk yang cukup luas. Produk-produk elektronika pertahanan yang dihasilkan Len terbagi menjadi:

a. *System sensor, weapo control dan command* (SEWACO) *combat system*.
b. *System* radar pertahanan
c. *System surveillance* dan *Un-manned*
d. *System defence* I.T (*Information Technology*) dan Simulator
e. *System* Alkom (Alat Komunikasi) dan Pernika (Peranti Elektronika.

PT Len Industri (Persero) sebagai lead integrator industri radar nasional. PT Len Industri menjadi pemeran utama dalam pengembangan industri radar di Indonesia. Suksesnya industri radar ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi antara mitra strategis dan kegiatan litbangyasa (penulisan, pengembangan, dan rekayasa) dalam negeri (Rasydin, 2021).

BAB

7

PERENCANAAN PRODUKSI RADAR

Agar dapat menyusun *Grand Design* Kemandirian Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alpalhankam secara tepat, maka perlu dipetakan dahulu apa sebenarnya yang menjadi tantangan atau masalah yang dihadapi selama ini untuk kemudian dirumuskan solusinya berupa arah kebijakan dan strategi yang tepat. Untuk memandang secara holistik permasalahan yang dihadapi, maka perlu melibatkan 3 pilar dalam pencapaian kemandirian Industri Pertahanan, yakni pemerintah, pengguna dan Industri Pertahanan. Kemudian, agar dapat lebih fokus dan sistematis, maka ketiga pilar ini dijabarkan ke dalam 4 aspek yang saling terkait. Dengan demikian, pemetaan masalah menjadi lebih jelas dan arah kebijakan dan strategi yang akan dirumuskan juga menjadi lebih tepat sasaran. Ke empat aspek tersebut antara lain adalah aspek regulasi dan kebijakan, aspek pengguna, aspek penguasaan teknologi, dan aspek kapabilitas Industri Pertahanan.

Konsolidasi BUMN industri pertahanan memegang peranan penting dalam pencapaian visi Presiden RI yang diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Disebutkan dalam RPJMN 2020-2024 ada 3 poin yang wajib direalisasikan dalam penguatan kemampuan pertahanan. Pertama, 100% essential force yang siap secara operasional pada tahun 2024. Kedua, kesiapan alpahankam utama. Ketiga, meningkatkan kemampuan BUMN Indhan untuk mendukung alpahankam. Presiden juga telah menyetujui rencana pembentukan holding BUMN Indhan dalam Rapat Terbatas (Ratas) kabinet tanggal 13 April 2021.

BAB

8

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Agar dapat menyusun Grand Design Kemandirian Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alpalhankam secara tepat, maka perlu dipetakan dahulu apa sebenarnya yang menjadi tantangan atau masalah yang dihadapi selama ini untuk kemudian dirumuskan solusinya berupa arah kebijakan dan strategi yang tepat.

1. Faktor Pendukung

a. Faktor Eksternal

Meskipun menghadapi beberapa tantangan yang cukup berat, Indonesia masih memiliki peluang yang cukup baik dalam membangun industri pertahanan, dengan dukungan penuh oleh pemerintah untuk mengejar ketinggalan dan menyusul negara-negara lain yang telah lebih maju. Pengembangan industri alutsista pada saat ini menuntut adanya perbaikan terhadap implementasi manajemen produksi yang inovatif dan relevan. Permintaan pasar luar negeri juga bergantung kepada perkembangan lingkungan strategis, dan pendekatan antar negara, sebab pasar luar negeri dibatasi oleh undang-undang untuk melakukan ekspansi penjualan ke luar negeri. Untuk memelihara stabilitas industri, perusahaan perlu memberikan perhatian untuk melakukan usaha terus menerus, perusahaan perlu menyusun scenario industri, yang disusun atas dasar sejumlah asumsi yang layak mengenai berbagai ketidakpastian penting yang dapat mempengaruhi struktur industri, beserta semua faktor pentingnya terhadap upaya

BAB 9

PENUTUP

Industri Radar Indonesia mendunia dapat diwujudkan diawali dengan penandatanganan kerja sama pengadaan 25 unit radar yang dilakukan oleh PT LEN Industri (Persero) yang merupakan perusahaan induk dari Holding BUMN Industri Pertahanan yang bernama Defend ID dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan antara PT LEN Industri (Persero) dengan Thales perusahaan asal Perancis merupakan bentuk pengimplementasian perencanaan kebijakan PT LEN Industri (Persero) dalam produksi radar. Penandatanganan Kerjasama tersebut dilakukan pada tahun 2021 dan akan segera dilaksanakan. Kerjasama ini sangat positif untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Pengembangan pusat industri radar nasional bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan regional, menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta penguasaan dan kemandirian teknologi sehingga dapat menggerakkan perekonomian Indonesia. Pembangunan Industry Radar Nasional dapat meningkatkan *Gross Domestic Product* dan pertumbuhan perekonomian dengan mengurangi impor, menumbuhkan investasi dan orientasi ekspor kedepannya, dapat bersaing dengan produk luar, menciptakan tenaga kerja dan tentunya meningkatkan kemandirian teknologi dalam negeri.

Faktor Pendukung dan Penghambat perencanaan kebijakan PT LEN dalam produksi radar guna meningkatkan pendapatan negara. Sebagai faktor pendukung yang utama adalah tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap kebutuhan Alpalhankam dalam negeri yang sampai saat ini masih sangat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Yusgiantoro, P. (2014). *Defense Economics*. *Main Library Gramedia. Jakarta*.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penulisan pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R\&D*.

Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penulisan Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. In *CV. Alfabeta*. CV. Alfabeta.

Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen publik*. Grasindo.

Artikel dan Tesis

Armandos, D., Yusnaldi, Y., & Purwanto, P. (2017). Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam Mendukung Keamanan Maritim di Pulau Nipa. *Keamanan Maritim*, *3*(2).

Arsita, S. A., Saputro, G. E., & Susanto, S. (2022). Implementasi Kebijakan Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Offset (IDKLO) dalam Pengadaan Meriam 155 MM Caesar untuk Mendukung Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penulisan Manajemen Pertahanan*, *8*(1).

Batubara, F. D., Gultom, R. A. G., & Bura, R. O. (2020). Desain Konseptual Integrasi Sistem Drone/Uav Dan Sensor Radar Pasif Sebagai Fungsi Situasional Blank Spot Filler Sistem Radar Pertahanan Udara (Studi: Satuan Radar 211 Tanjung Kait). *Teknologi Penginderaan*, *2*(1).

Berman, P. (1980). *Toward an Implementation Paradigm of Educational Change.*

DeLeon, P., & DeLeon, L. (2002). What ever happened to policy implementation? An alternative approach. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *12*(4), 467–492.

Easton, D. (1953). *The Political System. New York: AlfredA*. Knopf.

EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. *Political Science Quarterly*, *94*(4), 601–616.

Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1989). Policy makers, policy choices, and policy outcomes: The political economy of reform in developing countries. *Policy Sciences*, *22*(3), 213–248.

Gunawan, D., Lestari, A. A., & others. (2021). Analisis lokasi Penempatan Radar GCI dan Gap Filler dalam Mendukung Pertahanan Negara Berbasis Sistem Informasi Geografis di Wilayah KOSEKHANUDNAS I. *Teknologi Penginderaan*, *3*(1).

Guntur, H. J. P. Y. S., & Saputro, E. (n.d.). *Integrated Structure in the Defense Industry Sector*.

Heinz, E., & Prewitt, K. (1973). Labyrinths of Democracy. *Indianapolis: Bobbs-Merrill*, 464–488.

Hjern, B. (1982). Implementation research—the link gone missing. *Journal of Public Policy*, *2*(3), 301–308.

Hjern, B., & Porter, D. O. (1983). Implementation structures: A new unit of administrative analysis. In *Realizing social science knowledge* (pp. 265–277). Springer.

Hogwood, B., & Gunn, L. (1993). *Why "perfect implementation" is unattainable. The Policy Process. A Reader*, *2*, 217–225.

Hogwood, B. W., Gunn, L. A., & Archibald, S. (1984). *Policy analysis for the real world* (Vol. 69). Oxford University Press Oxford.

Keliat, M. (2010). Ekonomi Pertahanan Indonesia. *Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi*, *9*(1).

Kolonel, P., & Jaetul, S. (1995). *Markas besar angkatan udara staf ahli*. *1945*, 1–22.

Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. Sage.

Kurniawan, S. (2012). *Saatnya BUMN Tampil Sebagai Korporasi*. Marketeers.

Lasswell, H. D. (2017). *Power and personality*. Routledge.

Lipsky, M. (1971). *Street-level bureaucracy and the analysis of urban reform. Urban Affairs Quarterly*, *6*(4), 391–409.

Pramadi, M. M. T. N. I. P. N., Lestari, A. A., Winarko, O. D., Yulian, D., Hidayat, R., Nugroho, H. A., Prasaja, F., Patriadi, D. D., Putri, I. H., & Titasari, M. (1998). Radar dan Stealth. *Delft University of Technology*, *2013*.

Pujiatmoko, S., Mualim, M., Sasongko, N. A., & others. (2022). PT PAL *Empowerment Strategy as a Lead Integrator at ALPALHANKAM KCR 60 to Support State Defense at Sea*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *972*(1), 12059.

Rianto, M. S. (2017). Peningkatan Peran PT. Daya Radar Utama dalam Pembangunan KRI Jenis Angkut Tank Guna Mendukung Terwujudnya Kemandirian Industri Pertahanan. *Strategi Perang Semesta*, *3*(3).

Richards, M. A., Scheer, J., Holm, W. A., & Melvin, W. L. (2010). *Principles of modern radar* (Vol. 1). Citeseer.

Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1983). *The prospects for effective implementation of regulatory policy. In Can Regulation Work?: The Implementation of the 1972 California Coastal Initiative* (pp. 1–26). Springer.

Santiko, U., & Agustien, M. D. (2022). Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis dalam Memenuhi Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019. *Moestopo Journal of International Relations*, *2*(1), 77–90.

Saputra, O. I., Darmawan, W. B., & Dermawan, W. (2022). Kebiajakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Udara. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, *1*(1), 72–80.

Savitri, R. N. R., & Prabandari, A. P. (2020). TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(2), 236–245.

Setiani, B. (2018). Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing. *Jurnal Konstitusi*, *14*(3), 489–510.

Sjamsoedin, S. (2013). *Era Kebangkitan Industri Pertahanan*. Kompas.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration \& Society*, *6*(4), 445–488.

Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Widodo, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan Udara. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, *9*(2).

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center for Academic Publishing Service.

Winter, S. (1999). *Policy Currents*.

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Peraturan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan

INDUSTRI RADAR INDONESIA MENDUNIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta mensejahterahkan rakyat, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Dalam melindungi rakyat Indonesia sangat dibutuhkan pembangunan pertahanan negara yang dilaksanakan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nir-militer, sesuai dengan yang dituangkan pada undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara yang dibangun untuk menghadapi ancaman militer adalah pertahanan militer.

Industri Radar Indonesia Mendunia dapat diwujudkan diawali dengan penandatanganan kerjasama pengadaan 25 unit radar yang dilakukan oleh PT LEN Industri (Persero) yang merupakan perusahaan induk dari Holding BUMN Industri Pertahanan yang bernama Defend ID dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan antara PT LEN Industri (Persero) dengan Thales perusahaan asal Perancis merupakan bentuk pengimplementasian perencanaan kebijakan PT LEN Industri (Persero) dalam produksi radar. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan pada tahun 2021 dan akan segera dilaksanakan. Kerjasama ini sangat positif untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-852-0
9 786234 598520